

ANALISIS DETERMINAN KEMAMPUAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Marenstha Vrinsca Killi¹, M. E. Perseveranda², Stanis Man³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: marensthakilli17@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the determinants of loan repayment capacity from the perspective of regional finance in East Nusa Tenggara Province. The main focus of this research is to assess the factors influencing the fiscal capacity of the region in fulfilling its loan repayment obligations, particularly from the aspects of Local Own-Source Revenue (PAD), intergovernmental transfer funds, and the level of budget management efficiency. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach on the Provincial Government of East Nusa Tenggara. Data were obtained through interviews with the Regional Financial Agency and Commission III of the Regional House of Representatives, as well as documentation of the Regional Budget (APBD) realization reports for the period of 2021–2024. The results indicate that the loan repayment capacity of East Nusa Tenggara Province is categorized as very safe, with the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) consistently exceeding the minimum standard of 2.5, ranging from 16.80 to 52.75 during the research period. This shows that the province's revenue is more than sufficient to meet its debt obligations. The efficiency level of budget management also shows significant improvement, from 80.06% in 2021 to 91.76% in 2024, indicating increasingly effective APBD management. However, the expenditure structure remains dominated by personnel expenses, thereby limiting the fiscal space for productive spending. Overall, the study concludes that PAD, transfer funds, and budget efficiency play crucial roles in determining the region's ability to repay its loans. The Provincial Government of East Nusa Tenggara should continue to enhance fiscal independence by optimizing PAD and reallocating expenditures toward productive sectors to maintain sustainable fiscal capacity and support regional economic development.*

Keywords: *Regional Finance, Regional Loans, Debt Service Coverage Ratio, Budget Efficiency, East Nusa Tenggara.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kemampuan pengembalian pinjaman dalam perspektif keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, dan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Keuangan Daerah dan DPRD Komisi III, serta dokumentasi laporan realisasi APBD tahun 2021–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengembalian pinjaman daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori sangat aman, dengan

nilai *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* selama periode penelitian yang selalu jauh di atas standar minimal 2,5, yaitu berkisar antara 16,80 hingga 52,75. Hal ini menandakan bahwa pendapatan daerah lebih dari cukup untuk menutup kewajiban utang. Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran juga menunjukkan perbaikan yang signifikan, dari 80,06% pada tahun 2021 menjadi 91,76% pada tahun 2024, yang mengindikasikan pengelolaan APBD yang semakin efektif. Namun demikian, struktur belanja masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif masih terbatas. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa PAD, dana transfer, dan efisiensi anggaran memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dan pergeseran alokasi belanja ke sektor-sektor produktif agar kapasitas fiskal daerah tetap berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Pinjaman Daerah, *Debt Service Coverage Ratio*, Efisiensi Anggaran, Nusa Tenggara Timur.

PENDAHULUAN

Keuangan merupakan unsur penting bagi setiap kegiatan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keuangan merupakan salah satu faktor pengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kondisi terkini keuangan sebuah daerah dapat terlihat pada struktur APBD-nya. APBD menggambarkan perencanaan keuangan daerah yang meliputi proyeksi penerimaan, pengeluaran dan sumber pembiayaan pemerintah daerah pada periode tertentu (Saragih, 2003)

Kemandirian keuangan daerah tidak menuntut setiap pemerintah daerah harus membiayai seluruh kebutuhannya hanya dari pendapatan asli daerah. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, penerimaan daerah mencakup PAD, Dana

Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Penerimaan yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan guna mendukung pelaksanaan pembangunan, meskipun sumber PAD untuk membiayai belanja daerah masih sangat rendah. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan menggunakan dana pinjaman sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

Pembangunan daerah memerlukan ketersediaan dana yang mencakup perkembangan fiskal sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat struktur ekonomi dan mengelola sumber keuangan untuk mendukung pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Adapun rincian penerimaan pinjaman daerah yang bersumber dari PT SMI-PEN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman yang
bersumber dari PT SMI-PEN

No	Tanggal	Rekening	Jumlah (Rp)
1	17 Desember 2021	00101020010187/1013548863	250.778.440.000,00
2	14 April 2022	00101020010187/1013548863	451.401.192.000,00
3	14 Oktober 2022	00101020010187/1013548863	278.697.691.256,00
Jumlah			980.877.323.256,00

Sumber: *Badan Keuangan Daerah*

Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pengembalian pinjaman daerah tidak hanya terkait pada aspek administratif pembayaran, tetapi juga erat kaitannya dengan kemampuan fiskal daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rahman (2020), keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan pada dana perimbangan berimplikasi langsung terhadap stabilitas fiskal serta kapasitas daerah dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman. Dengan demikian, kasus pengembalian sisa dana pinjaman PEN Daerah di Provinsi NTT dapat dipahami dalam kerangka permasalahan struktural pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Masalah Penelitian

1. Bagaimana gambaran mengenai pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Bagaimana gambaran mengenai pengembalian pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

3. Bagaimana Dana Transfer ke Daerah berperan dalam pengembalian pinjaman daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

4. Bagaimana Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Daerah mempengaruhi kemampuan pengembalian pinjaman daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis gambaran mengenai pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menganalisis gambaran mengenai pengembalian pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengevaluasi peran Dana Transfer ke Daerah dalam mendukung pengembalian utang daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk menilai pengaruh Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran terhadap kemampuan pengembalian pinjaman daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk

memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif para informan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena terkait pengelolaan keuangan publik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini penulis membatasi wilayah penelitian yakni hanya dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan waktu penelitian selama 6 bulan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan September 2025.

3) Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara: dilakukan secara langsung dengan informan yang relevan untuk menggali pandangan, pengalaman dan persepsi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Wawancara bersifat semi terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi data. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah :
 - Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Plt. Kepala Badan

Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Anggota DPRD Komisi Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Dokumentasi : peneliti mengkaji dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, peraturan daerah dan notulen rapat yang relevan.

4) Teknik Analisis Data

1. Analisis Pinjaman dan Pengembaliannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rumus perhitungan DSCR adalah sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Kewajiban Pembayaran Utang (Pokok + Bunga)}}$$

2. Analisis Peran Dana Transfer
Rumus rasio kontribusi pemotongan DAU terhadap total DAU :

$$\begin{aligned} &\text{Kontribusi Pemotongan DAU (\%)} \\ &= \frac{\text{Pemotongan DAU}}{\text{Total DAU}} \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

3. Analisis Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah

Rumus rasio efisiensi anggaran adalah

:

Rasio Efisiensi Anggaran

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran yang Dialokasikan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Gambaran Pinjaman Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), atau PT SMI, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 26 Februari

2009 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01/2009, dengan tujuan utama mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT SMI berperan strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang seringkali tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh APBN/APBD. PT SMI juga berperan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pinjaman ini bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang terdampak pandemi.

Rincian realisasi pinjaman Pemerintah Provinsi NTT kepada PT SMI selama periode 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Pinjaman Daerah Provinsi NTT kepada PT SMI-PEN (2021-2024)

No	Tanggal	Rekening	Jumlah (Rp)
1	17 Desember 2021	00101020010187/1013548863	250.778.440.000,00
2	14 April 2022	00101020010187/1013548863	451.401.192.000,00
3	14 Oktober 2022	00101020010187/1013548863	278.697.691.256,00
Jumlah			980.877.323.256,00

Sumber:Badan Keuangan Daerah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa total pinjaman yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTT dari PT SMI dalam rangka program PEN mencapai Rp980,87 miliar selama periode 2021–2022. Dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis daerah, seperti peningkatan jalan provinsi, pengembangan fasilitas kesehatan, penyediaan sarana pendidikan, serta program prioritas lain yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat NTT.

2) Pengembalian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pengembalian Pinjaman

Untuk mengetahui kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman, peneliti menggali informasi terkait kondisi keuangan daerah dan mekanisme pembayaran pinjaman. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKD Provinsi NTT menjelaskan bahwa:

“Secara fiskal, kemampuan Provinsi NTT dalam membayar kewajiban pinjaman daerah berada dalam kondisi yang sangat aman. Hal ini tercermin dari nilai Debt Service Coverage Ratio yang selalu berada

jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan.”

Lebih lanjut, BKD menyampaikan:

“Pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman, khususnya pinjaman dari PT SMI melalui program PEN, dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung Dana Alokasi Umum serta didukung oleh alokasi APBD untuk biaya pengelolaan.”

Pandangan tersebut kemudian dilengkapi oleh Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi III yang menekankan bahwa :

“Meskipun secara teknis kemampuan membayar pinjaman tidak menjadi masalah, pemanfaatan pinjaman daerah tetap harus diarahkan pada kegiatan yang produktif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.”

Tabel 4.2

Daftar Rincian Pengembalian Pokok Pinjaman, Biaya Bunga dan Biaya Pengelolaan s.d 31 Desember 2024

Tahun	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Total (Rp)
2021	0,00	96.573.297,00	1.855.760.456	1.952.333.753,00
2022	0,00	1.299.032.319,00	9.808.773.233,00	11.107.805.552,00
	0,00	35.642.958.560,00	0,00	35.642.958.560,00
2023	0,00			
	24.779.266.206,00	61.069.423.338,00	0,00	85.848.689.544,00
2024	0,00		1.571.676.183,00	1.571.676.183,00
	163.091.729.270,00	55.688.549.678,00	0,00	218.780.278.948,00
Jumlah	187.870.995.476,00	153.796.537.192,00	15.050.832.920,00	356.718.365.588,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Tabel 4.2 menyajikan informasi mengenai kewajiban keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) – PT SMI dalam rangka pengembalian pinjaman daerah. Rincian mencakup pembayaran pokok pinjaman, biaya bunga, dan biaya pengelolaan dari tahun 2021 hingga akhir 2024.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTT membayar bunga pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU langsung dan biaya pengelolaan melalui mekanisme pengeluaran APBD. Rincian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT antara lain :

Tabel 4.3

Daftar Rincian Pembayaran Biaya
Pengelolaan yang Dibayar Langsung oleh
Pemerintah Provinsi NTT

No	Uraian	SP2D		Kewajiban	Jumlah (Rp)
		Nomor	Tanggal		
1	S- 592/SMI/DPPPP/ DPPU-1/0823, Tanggal 8 Agustus 2023	2304/5.02.0. 0.0.0.00.02/SP2D /LS/2024	17/08/2023	1.571.676.183,00	1.571.676.183,00
Jumlah				1.571.676.183,00	1.571.676.183,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah

2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Tabel 4.4

Perhitungan *Debt Service Coverage Ratio*
Tahun 2021-2024

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Belanja Bunga (Rp)	Pokok Utang (Rp)	Total Debt Service (Rp)	DSCR
2021	5.312.446.872.608,51	17.483.698.421,50	114.357.098.564,20	131.840.796.985,70	40,29
2022	4.426.473.562.255,23	54.539.281.319,24	208.953.545.889,90	263.492.827.209,14	16,80
2023	4.624.897.387.195,26	62.884.046.386,00	24.779.266.206,00	87.663.312.592,00	52,75
2024	4.834.539.892.496,74	57.260.225.861,00	163.091.729.270,00	220.351.955.131,00	21,94

Sumber data diolah 2025

Berdasarkan hasil perhitungan DSCR dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021–2024, terlihat bahwa daerah memiliki kemampuan yang sangat memadai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Secara umum, nilai DSCR selalu berada jauh di atas angka 1, yang berarti bahwa pendapatan daerah lebih dari cukup untuk menutup beban pembayaran utang (pokok + bunga) setiap tahunnya.

3) Peran Dana Transfer ke Daerah dalam Mendukung Pengembalian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTT membayar bunga pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU langsung dan biaya pengelolaan melalui mekanisme pengeluaran APBD. Rincian biaya yang

dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT
antara lain :

Tabel 4.5

Kontribusi Pemotongan DAU Bagi
Pengembalian Pinjaman Daerah Tahun
2021-2024

TAHUN	DANA ALOKASI UMUM	POTONGAN	KONTRIBUSI (%)
2021	1.726.712.089.000	1.952.333.753	0,11
2022	1.730.933.330.000	35.642.958.560	2,05
2023	1.876.608.978.000	85.848.689.544	4,57
2024	1.658.080.793.000	215.329.093.894	12,98

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan data tahun 2021–2024, terlihat bahwa kontribusi DAU terhadap pengembalian pinjaman daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,11% pada 2021 menjadi 12,98% pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa beban kewajiban pinjaman semakin besar dari tahun ke tahun, di mana pada awalnya nyaris tidak berpengaruh terhadap DAU, namun kemudian mulai menyerap porsi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan cicilan pokok dan bunga yang harus ditanggung daerah, sehingga secara langsung mengurangi fleksibilitas penggunaan DAU untuk belanja prioritas lainnya.

4) Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Tabel 4.6

Rasio Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
2021	6.880.672.335.906	5.508.767.906.133	80,06	Kurang Efisien
2022	5.497.911.918.082	4.816.652.654.357	87,61	Cukup Efisien
2023	4.895.785.466.821	4.460.910.047.268	91,11	Efisien
2024	5.159.746.069.530	4.734.422.922.878	91.76	Efisien

Sumber data diolah 2025

Secara keseluruhan, periode empat tahun ini memperlihatkan perjalanan dari kondisi kurang efisien di 2021 menuju efisien di 2023 dan 2024, dengan total perbaikan hampir 12 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan adanya pembelajaran yang cepat dalam mengelola belanja daerah, baik dari sisi perencanaan yang lebih rasional maupun kemampuan teknis dalam mengeksekusi program. Implikasinya, ruang fiskal menjadi lebih sehat karena dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan, sementara beban sisa anggaran yang tidak terserap semakin kecil.

KESIMPULAN DDAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data, wawancara, perhitungan *Debt Service*

Coverage Ratio (DSCR), dan perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran. diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan pinjaman daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, khususnya melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Total pinjaman yang direalisasikan mencapai Rp980,87 miliar dan dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur strategis daerah.

Pengembalian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengembalian pinjaman Pemerintah Provinsi NTT berada dalam kategori **sangat aman**. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang secara konsisten jauh di atas batas minimal 2,5, yakni berkisar antara 16,80 sampai 52,75 selama periode penelitian

2. Peran Dana Transfer ke Daerah dalam Pengembalian Pinjaman

Dana transfer dari pemerintah pusat (DAU, DAK, dan DBH) memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal

daerah, terutama sebagai sumber pendanaan utama dalam struktur pendapatan APBD. Dana transfer membantu menjaga stabilitas keuangan daerah sehingga kewajiban pembayaran pinjaman dapat dipenuhi tanpa mengganggu belanja wajib dan belanja pembangunan..

3. Pengaruh Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran terhadap Kemampuan Pengembalian Pinjaman

Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan tren yang semakin membaik, dari 80,06% pada tahun 2021 menjadi 91,76% pada tahun 2024. Peningkatan efisiensi ini berkontribusi positif terhadap kemampuan pengembalian pinjaman, karena penggunaan anggaran yang lebih efektif memperbesar ruang fiskal untuk memenuhi kewajiban utang.

Berdasarkan hasil analisis data, wawancara, serta perhitungan kinerja keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pengembalian pinjaman Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam kondisi yang sangat baik dan aman.

Pinjaman daerah, khususnya yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),

terbukti berperan penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi daerah. Namun, pemanfaatan pinjaman tersebut tetap memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tidak mengurangi fleksibilitas fiskal di masa mendatang.

Pendapatan daerah, terutama yang berasal dari Dana Transfer ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendukung kemampuan pembayaran pinjaman. Di sisi lain, peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran yang terus terjadi menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah, meskipun struktur belanja masih didominasi oleh belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif masih relatif terbatas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi anggaran, serta pengelolaan pinjaman yang prudent merupakan kunci utama untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah dan mendukung pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggara, F. (2017). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemampuan Pengembalian Pinjaman Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*.
- Bahl, R., & Linn, J. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Balaguer, C. (2013). Determinants of Local Government Borrowing in OECD Countries. *Public Budgeting & Finance*.
- Baldrick, A. (2017). *Pendapatan Daerah dan Kemandirian Fiskal*. Yogyakarta: Andi.
- Budi Santoso. (2017). Faktor-Faktor Penentu Pinjaman Daerah di Indonesia: Studi pada Pemerintah Provinsi. *Jurnal Keuangan Daerah*.
- Carunia, M. (2017). *Keuangan Daerah: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Kencana.
- Dwi Setiawan. (2020). Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah terhadap Kemampuan Pengembalian Pinjaman. *Jurnal Kebijakan Publik*.

- Endang Rahayu. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemampuan Pengembalian Pinjaman Daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*.
- Fauzi, A. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Daerah terhadap Pinjaman Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2019). *Principles of Managerial Finance*. Pearson.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. (2015). *Teori Keuangan dan Ekonomi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henny Yulsiati & Romibil Maqrud. (2022). Determinan Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Kasmir. (2018). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kunarjo. (1996). *Pinjaman Daerah dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Kurniawan, H. (2019). Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Musgrave, R. (1993). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahman, A. (2020). Ketergantungan Fiskal Daerah dan Kapasitas Pembayaran Utang. *Jurnal Kebijakan Fiskal*.
- Rina Wijayanti. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Daerah terhadap Kemampuan Pengembalian Pinjaman Daerah. *Jurnal Ekonomi Pemerintahan*.
- Saragih, Y. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia.

- Sidik, M., & Denok, S. (2017). Optimalisasi PAD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*.
- Sihombing, R. (2010). Pengaruh Dana Perimbangan dan PAD terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*.
- Stiglitz, J. (1998). *Economics of the Public Sector*. New York: Norton.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Supriyanto, A. (2020). Peningkatan PAD dan Dampaknya terhadap Kemampuan Membayar Utang Daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Sutrisno. (2013). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wahyuni, L. (2019). Dampak Pinjaman Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*.
- William, Abdul & Muliyani. (2021). Kelayakan Pinjaman PEN Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Keuangan Daerah*.
- Yulianti Prasetyo. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemampuan Pembayaran Pinjaman Daerah. *Jurnal APBD Indonesia*.
- Yusuf, M., & Rahmawati, L. (2021). Ketergantungan Transfer Pusat dan Risiko Fiskal Daerah. *Jurnal Ekonomi Publik*.
- Yusuf, M. (2021). Pinjaman Daerah dan Kapasitas Fiskal. *Jurnal Keuangan Publik*